

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan masyarakat yang majemuk. Majemuk dalam artian memiliki banyak perbedaan dalam persoalan prinsip antara individu maupun kelompok. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi Indonesia, bahkan daya tarik ini juga menjadikan Indonesia mendapat perhatian dari dunia luar untuk mempelajari, meneliti dan ingin menjadi bagian dari Indonesia.

Perbedaan-perbedaan ini tidak lah selalu menjadi baik dalam kenyataannya, tetapi juga memiliki berbagai macam masalah yang kompleks menurut masing-masing sudut pandang perbedaannya. Berbagai macam ras, suku, budaya, agama dan bahasa yang berbeda pernah terlibat dalam konflik perseteruan dari masa kerajaan-kerajaan nusantara, masa penjajah, hingga masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika pada masa kerajaan-kerajaan nusantara perbedaan-perbedaan yang ada hanyalah sebatas dinasti kerajaan yang ingin berkuasa atau pun dinasti yang ingin memperluas kavliah kekuasaannya. Jika pada masa penjajahan perbedaan yang paling terasa dan yang paling kelihatan adalah perbedaan ras, ideologi dan gaya hidup, serta sifat colonial kepada masyarakat yang didatangi. Perseteruan diakhiri dengan peperangan dan gencatan senjata. Namun di masa NKRI perseteruan yang terjadi lebih dinamis. Karena Negara Indonesia ini dibentuk selain untuk membebaskan diri dari penjajahan dunia luar, tetapi juga untuk menyatukan sekat sekat perbedaan yang telah dihadapi sejak dahulu.

Bhinneka tunggal ika (berbeda-beda namun tetap satu juga) adalah semboyan untuk memperkuat nasionalisme Negara diatas perbedaan. Untuk menjaga nasionalisme agar tetap utuh diatas perbedaan maka Negara memiliki undang-undang yang berlaku mengatur untuk setiap yang melanggar nilai-nilai perbedaan dikenai sanksi berupa pidana seperti yang termaktub pada Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, tentu saja guna pemerintah mengatur undang-undang itu sedemikian rupa agar tidak terjadi gesekan antar individu maupun kelompok masyarakat.

Pada kesempatan kali ini yang akan menjadi pembahasan adalah masalah kepemimpinan yang dalam memilih pemimpin anggota masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan dari sudut pandang tertentu, baik dalam sudut pandang agama yang dianut, budaya atau kesukuan yang mendarah daging bagi setiap masyarakat, bahkan hingga warna kulit atau ras. Dalam kenyataannya polemik ini yang terus bergulir akhir-akhir ini adalah persoalan memilih pemimpin berdasarkan agama, yang kemudian oleh beberapa oknum sehingga dikaitkan menjadi persoalan ras juga.

Dalam agama Islam, memilih pemimpin kafir atau pun menjadikan orang kafir sebagai pemimpin sangat dilarang dan orang muslim yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin bias dijatuhi hukum sebagai kafir dan dekat dengan kekufuran karena tergolong seperti mereka, seperti yang termaktub dalam surah Al-Maidah 51 sebagai berikut:¹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٥١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim

Dalam sistem Negara kita yang menganut sitem demokrasi, memilih pemimpin berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan tertentu tidak dibenarkan sepanjang tidak ada anjuran untuk itu, karena setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam memilih, dan siapa saja berhak dipilih.

Masyarakat Indonesia merupakan mayoritas beragama Islam, kondisi masyarakat Indonesia sangat tergantung pada kontribusi yang diberikan umat Islam. Peranan umat islam dapat terlihat dalam merealisasikan hukum, sosial, politik,

¹ Q.S. Al-Maidah / 5:51

ekonomi, dan lain. Hal ini dikarenakan agama Islam itu sendiri bukan sekedar agama yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan melalui jalur peribadatan saja, tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sistem hukum, sosial politik, ekonomi memberikan ruang bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasi secara konstruktif bagi kepentingan bangsa secara menyeluruh. Permasalahan pokok yang menjadi kendala saat ini adalah kemampuan dan konsistensi umat Islam Indonesia terhadap karakter dasarnya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur yang ada. Sekalipun secara kuantitas mayoritas, namun kualitasnya masih rendah sehingga perlu pemberdayaan secara sistematis.²

Politik adalah segala kegiatan yang berkenaan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat masyarakat umum. Ruang lingkup politik tidak hanya menyangkut berbagai hal seputar pemerintah, tetapi juga berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dan individu-individu. Berbagai macam kegiatan tersebut merupakan cara bagi rakyat yang berada diluar pemerintah untuk mempengaruhi proses politik dalam pemerintahan.³

Pilpres 2014 menjadi contoh aktual. Pada 22 Juli 2014, para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan bahwa hajat demokrasi saat itu telah menghasilkan sepasang nama yang menjadi pemenang Pilpres sehingga berhak menjabat Presiden dan Wakil Presiden ke -7 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ; Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Boleh dibilang drama pemilihan kepala Negara kali ini unik, karena seyogiannya gerakan massa yang terpecah menjadi dua kubu terus meningkatkan suhu politik dari mulai sebelum pencoblosan yakni masa kampanye hingga setelah pencoblosan yakni menunggu keputusan resmi dari KPU. Suhu politik semakin meningkat setelah KPU memutuskan memenangkan pasangan Jokowi-JK yang menang mutlak oleh hasil real count yang di rilis KPU, namun kubu yang kalah yakni pasangan Calon Presiden (capres) Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden (cawapres) Hatta Rajasa merasa tidak puas dan menuding terjadinya kecurangan “terstruktur, sistematis, dan massif” sepanjang prosesnya.

² Tim MPK Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Medan, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Cita Pustaka, 2009), h. 216

³ Kacung Marijan, *politik Dalam Islam*, (Bandung: 2002), h. 93

Salah satu isu yang bertabur sejak masa pilpres hingga saat ini adalah isu agama, suku, dan ras, dan antar golongan. Anehnya isu-isu tersebut selalu menjadi santapan terbaik oknum masyarakat yang menaburkan kampanye hitam untuk menjatuhkan salah satu dari kandidat calon yang dipilih. Terutama isu agama, seperti contoh kasus popularitas Jokowi yang langsung anjlok karena isu pemimpin non-muslim. Isu demikianpun juga dilemparkan ke Prabowo Subianto yang dikatakan bahwasanya keluarga Prabowo tidak memiliki agama yang jelas karena Ibu dan adiknya adalah beragama Nasrani, namun masyarakat muslim pada umumnya tidak terlalu mengambil perhatian karena mereka meyakini keimanan Prabowo Subianto terlebih mayoritas ulama sepenuhnya mendukung pasangan capres cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Isu agama dalam memilih pemimpin menjadi momok yang mengancam bagi sebagian politisi yang bukan beragama mayoritas di Indonesia. Karena solidaritas agama menjadi sangat berpengaruh dalam menentukan kemenangan politik dalam Pemilihan-pemilihan Kepala Daerah (pilkada) maupun pilpres sekalipun. Karena merebaknya hal ini para pemangku kepentingan mulai menyuarakan isu-isu tandingan seperti pluralisme, sekularisme, sosialisme, liberalisme, dengan tujuan agar dalam memilih pemimpin tidak perlu menjalankan atas dasar agama. Bahkan dari beberapa kalangan Islam sendiri memiliki pendapat yang berbeda dan seolah membolehkan memilih pemimpin non-muslim.

Pro dan kontra ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan hingga sampai lah pada puncaknya tanggal 27 September 2016 ketika Plt. Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (ahok) yang di anggap menistakan agama Islam karena pidato nya di anggap melecehkan surat Al-Maidah ayat 51 dan menuding orang yang menyampaikan ayat tersebut baik itu Ulama, Da'i, ustad kyai dan yang lain dianggap membohongi dan audiens yang mendengarkan di bodohi. Atas kejadian yang kontroversial ini umat Islam yang tidak terima mengambil langkah ke jalur hukum karena menganggap apa yang dikatakan Ahok adalah propaganda yang sangat berbahaya dan dapat merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Dalam skripsi ini, penyusun mengambil tema tentang pemimpin kafir dalam pemikiran Ustadz Bachtiar Nasir (telaah terhadap GNPF-MUI dan aksi damai 212) . Ustadz Bachtiar Nasir, Lc. MM. adalah seorang Da'i dan Ulama' yang sangat sering mengkaji dan mendalami Ilmu-Ilmu Al-Qur'an. Ustadz yang memimpin Ar-Rahman

Qur'anic Learning (AQL) Islamic Center ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Ketua Alumni Saudi Arabia se-Indonesia serta Ketua Alumni Madinah Islamic University se-Indonesia. Ia juga tercatat pernah menjadi Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namanya semakin ramai diberitakan saat ia didaulat menjadi penanggung jawab Aksi Damai 4 November 2016 di bawah nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

masalah kepemimpinan tidak ada habis nya untuk dibahas mulai dari penjelasan ayat Al-Quran, Sunnah Nabi, pandangan tokoh-tokoh Ulama klasik, modern hingga kontemporer saat ini, yang tentunya ini dikaitkan dengan konteks pemikiran seorang ulama muda terkemuka yang belakangan ini semakin dikenal karena gebrakannya yang menjadi tokoh sentral dari GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa – Majelis Ulama Indonesia) yang menggelar sejumlah aksi yang diyakini menjadi awal dari persatuan solidaritas ummat Islam di Indonesia.

Posisi dan peran ulama yang tergabung dalam GNPF-MUI sangatlah penting dan terfokus pada beberapa hal. Mereka yang dengan kualitas nya masing-masing berperan sebagai “pencerah” alam piker ummat. Para Ulama, sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan umat. Pemikiran para ulama menjadi bahan rujukan ilmiah yang selalu dipegangi dan terus digali untuk selalu dikembangkan secara aktif. Fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan oleh para Ulama selalu menjadi acuan pengetahuan, menjadi dasar bimbingan moral dan menjadi rujukan hukum sehingga umat tidak terombang-ambing dalam ketidak pasttian, terutama dalam menghadapi kompleksitas masalah social masyarakat yang selalu timbul dalam kehidupan ini dengan bergerak laju modernitas.

Selain itu, posisi sentral dan peranan strategis Ulama adalah sebagai panutan umat. Kualitas moral yang baik yang diperlihatkan dan dicontohkan oleh Ulama sangat penting dan strategis di tengah-tengah kehidupan umat dan bangsa yang mengalami gelombang transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dalam keadaan demikian terjadi arus pergulatan nilai dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara ideal seorang Ulama selalu diharuskan berperan sebagai figur moral pemimpin social. Kehadirannya tentu saja tidak dapat di pisahkan dengan situasi dan

kondisi umatnya. Umat adalah suatu konsep tentang komunitas Islam, yaitu kaum beriman yang diikat oleh kesamaan pandangan tentang keyakinan, kesucian, moral, spiritual. Sebagai ikatan kaum beriman. Umat dapat pula dianggap sebagai suatu komunitas kognitif, dimana keyakinan trasendental dan pengetahuan individu mendapatkan konfirmasi social (pengakuan dari masyarakat).

Dalam kaitan ini, Ulama merupakan tokoh sentral dalam masyarakatnya, sebab dibahu merekalah cita-cita dan eksistensi umat itu disangga dan diteruskan. Oleh sebab itu Ulama tidak hanya dilihat dari segi apa yang dilakukannya dan dari karakteristik pribadinya saja, tetapi yang penting lagi disamping itu ialah sejauh mana umat memberikan pengakuan padanya.⁴

Kita ditakdirkan hidup di dalam suatu bangsa yang pluralis, serba majemuk, etnisnya agamanya, budayanya maupun bahasanya. Perbedaan-perbedaan tersebut selama ini relatif tidak sampai merobek keutuhan kita, tidak sampai memporak-porandakan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia, meskipun kadang kala mengalami benturan-benturan lokal.⁵ Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu diciptakan bermacam-macam suku dan bangsa yaitu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 :⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Agar kehidupan suatu umat berjalan secara teratur dan hubungan sesama manusia berjalan dengan rukun dan damai. Maka diangkatlah seorang pemimpin yang diberikan kewenangan untuk mengomandoi pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Mengingat peranannya yang sangat signifikan, maka dalam Islam pengangkatan

⁴ Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal Jama'ah : Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta: Lantabora, 2005), Cet. Ke-5, h, 237.

⁵ Ibid., h. 281.

⁶ Q.S. Al-Hujurat/ 49: 13

seorang pemimpin adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan jika ada 2 orang muslim melakukan perjalanan jauh, Rasulullah menganjurkan agar salah seorang mereka diangkat sebagai pemimpin.

Kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal pemimpin atau cara memimpin. Sedangkan menurut Rauch dan Behling (1948,46) “*Leadership is the process of influencing the activities of an organized group toward goal achievement*”. Dengan kata lain kepemimpinan disini adalah suatu proses mempengaruhi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Penentuan seorang pemimpin dalam suatu kepemimpinan tidak dapat memperhatikan kepentingan dan keunggulan sebelah pihak saja, sebab dalam sebagian besar masyarakat struktur kekuasaan berkaitan erat dengan sistem kepercayaan, sebab nilai-nilai yang berfungsi untuk mempertahankan masyarakat itu bersumber pada sistem tersebut. Dalam sebuah pengantar, Sartono Kartodirdjo, mengungkapkan secara terperinci lagi kepemimpinan adalah pertemuan antara berbagai faktor : sifat golongannya, kepribadian dan situasi kejadian. Ketiga faktor itulah yang menunjukkan sifat multidisional gejala kepemimpinan, yaitu aspek social-psikologis, social antropologis, dan social-historis.⁷

Dengan demikian, untuk menghasilkan seorang pemimpin membutuhkan interaksi antara orang dan kepribadian yang kuat dengan faktor situasi agar tercipta suasana yang harmonis antara pemimpin dan masyarakat yang merespons positif setiap kegiatan.

Dalam dunia Islam, penentuan seorang pemimpin dapat mengarahkan warganya merupakan suatu wacana yang sering menjadi pembicaraan. Salah satunya menurut Dr. Anis Malik Thoah, bahwa dalam Islam, pemerintah atau *Khilafah* mencakup kepemimpinan agama dan dunia yang menggantikan Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana yang dinyatakan para ulama. Maka dalam hal kepemimpinan ini tidak boleh menggantikan Nabi Saw. Kecuali orang muslim. Adapun jabatan selain pos-pos yang kental dengan warga agama (selain pemimpin tentara dan peradilan) boleh dipercayakan kepada non-muslim yang memang berkompeten. Bahkan para *fuqaha* sekaliber Al-Mawardi menjelaskan bahwa *Dhimmi* diperbolehkan memegang jabatan eksekutif. Dan pada masa ke *Khalifahan Abbasiyah* beberapa Nasrani

⁷ Sartono Kartodirdjo, *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1984), h. vii.

memegang jabatan setingkat menteri seperti Nasr Ibn Harun (369H.) dan Isa Ibn Nasturus (380H.).⁸

Dengan dinamika skala nasional itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian Ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pemikiran Ustadz Bachtiar Nasir Tentang Pemimpin Kafir (Telaah Terhadap GNPF-MUI dan Aksi Damai 212 di Jakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah fokus penelitian adalah: “Bagaimana Pandangan Ustadz Bachtiar Nasir dan Ulama yang tergabung dalam GNPF-MUI tentang pemimpin kafir” dengan rincian masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ustadz Bachtiar Nasir tentang pemimpin kafir
2. .Apa tujuan nyata dari Aksi Damai 212 di Jakarta.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Ustadz Bachtiar Nasir tentang pemimpin kafir. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ustadz Bachtiar Nasir dalam kriteria memilih pemimpin dalam konteks Islam Indonesia khususnya para Ulama yang tergabung dalam GNPF-MUI
2. Untuk mengetahui sikap dari GNPF-MUI dalam menyikapi pemimpin kafir serta sikap nyata atas polemik skala nasional yaitu blunder Ahok serta atas kasus dugaan penistaan agama.

D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian

⁸ Anis Malik Thoha, *Tren Plurakisme Agama: Tinjauan Krisis*, (Jakarta: Prespektif, 2005), h. 260.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir secara akademis
- b. Sebagai literature yang baru bagi daftar kepustakaan untuk yang tertarik dan konsentrasi dengan bidang dan pemahaman yang sama.
- c. Sebagai dokumentasi bagi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara jurusan Pemikiran Politik Islam Khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk sebagai berikut:

- a. Sebagai wawasan pengetahuan terutama dalam bidang politik Islam, khususnya mengenai skema gerakan GNPF-MUI yang di ketuai oleh Ustadz Bachtiar Nasir dalam gejolak pemimpin kafir yang aktif pada periode akhir 2016 dan awal 2017
- b. Sebagai wacana pemikiran atau masukan bagi masyarakat luas dalam menyikapi soal kepemimpinan dan sebagai acuan kritis masyarakat untuk mengambil manfaat dari penelitian ini baik masyarakat yang pro atau pun kontra terhadap pemimpin kafir.
- c. Sebagai tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan mencapai gelar S1 di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara.

E. Batasan Istilah

Untuk tidak terjadi kesalahan dalam memahami arti dan istilah dalam penelitian ini, maka penelitian membatasi istilah sebagai berikut:

1. Pemikiran, artinya: berasal dari dasar kata pikir yang artinya proses, cara, perbuatan memikir. Lengkapnya berarti mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan. Ditinjau dari segi terminologi 'pemikiran adalah' kegiatan manusia

mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalanya untuk mendapatkan atau mengeluarkan pengetahuan yang baru atau yang lain.

2. GNPf-MUI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Gerakan ini secara kronologis muncul pada November 2016 sebagai sebuah bentuk pengawasan terhadap dugaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama/Ahok

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode sangat berpengaruh terhadap tercapai atau tidaknya tujuan yang diajukan dalam sebuah tulisan. Adapun langkah yang digunakan penulis untuk metode penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara langsung untuk memperoleh data primer yang berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi penulis. Yang mana mencari data lapangan yang kemudian dianalisis sesuai dengan metodologi yang digunakan dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi sekarang.

Melalu penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dengan melakukan beberapa langkah awal yaitu adanya masalah, kemudian menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data dan menarik suatu kesimpulan.⁹

Dilihat dari segi metode dan bentuk rancangannya dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dan pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.¹⁰

⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah"* (Jakarta Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 34-35.

¹⁰ Ibid, h. 34.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian ini diarahkan kepada Ustadz Bachtiar Nasir selaku ketua GNPF-MUI dan selaku tokoh yang dijadikan subjek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang hendak diteliti terdiri dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data-data yang merupakan karya sang tokoh yang dikaji, wawancara secara langsung, memperoleh dari ceramah atau kajian yang di isi oleh tokoh yang hendak dikaji, terutama yang terkait dengan wacana pemikiran pemimpin kafir.
- b. Data sekunder adalah buku-buku, kitab atau artikel mengenai pemikiran tokoh tersebut yang merupakan hasil interpretasi orang lain, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis mengenai persoalan teori naskh persoalan pemimpin kafir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi serta keterangan lainnya dari lokasi penelitian maka digunakan instrumen pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan melakukan wawancara mendalam, bias digali apa yang tersembunyi disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan. Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survey menjadi kurang memadai, tetapi wawancara terstruktur yang bias secara leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam.
- b. Observasi, kegiatan ini tidak hanya dilakukan terhadap yang terlihat, tetapi juga yang terdengar. Berbagai macam ungkapan pertanyaan yang terlontar dalam percakapan sehari-hari juga termasuk bagian dari kenyataan yang bias diobservasikan (observasi melalui indera pendengaran).¹¹

5. Teknik Analisis Data

¹¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 66-67

Teknik yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi, serta dokumen-dokumen yang didapat saat melakukan penelitian. Setelah data diperoleh dengan menggunakan metode-metode diatas. Maka penulis melakukan penyeleksian data untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kriteria yang dicapai, untuk mendapatkan data yang benar-benar valid maka penulis harus menyaring dan memilah data dalam satuan konsep tertentu. Sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang dicapai dalam penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari :

Bab I: Pendahuluan yaitu berupa gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: yaitu membahas deskripsi dari teori-teori tentang dan definisi pemimpin, karakteristik pemimpin dalam Islam, dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam, tugas-tugas seorang pemimpin, pemimpin menurut para Ulama klasik maupun kontemporer.

Bab III: yaitu metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: yaitu hasil penelitian yang meliputi definisi kepemimpinan kafir (non-muslim) , kewajiban umat dalam memilih pemimpin, karakteristik pemimpin menurut pandangan Ustadz Bachtiar Nasir, dasar pemikiran dan penentuan sikap Ustadz Bachtiar Nasir dan GNPF-MUI dalam penetapan kepemimpinan umat Islam di Indonesia.

Bab V: yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian ini, dan saran yang dipandang perlu untuk perbaikan penelitian ini.